



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 Maret 2017

Halaman: 13

Rusunawa Menyasar Bantaran Sungai

Yogya Rumuskan Solusi Penataan Kawasan Kumuh



Tiga lokasi tak jauh dari bantaran sungai

Edy Muhammad
Kepala Bappeda

YOGYA, TRIBUN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta menyatakan sudah memilih tiga lahan potensial untuk pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Pihak Bappeda berencana untuk membangun proyek rusunawa itu sebagai salah satu solusi penanganan kawasan kumuh di bantaran sungai. Studi kelayakan proyek ini akan ber-

langsung tahun ini.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menjelaskan, tiga lokasi yang potensial untuk pembangunan rusunawa ini berada tak jauh dari bantaran sungai. Yakni RW 1 atau RW 2 Ngampilan di bantaran Sungai Winongo, RW 10 Patangpuluhan di Sungai Winongo, dan RW 08 Warungboto yang berada di bantaran Sungai Gajahwong. "Semua lokasi yang potensial ini memang hasil kajian dan sudah kami kerucutkan. Tiga lokasi tak jauh dari bantaran sungai," kata Edy, Jumat (3/3). Edy menjelaskan, kawasan kumuh di perkotaan memang menjadi sebuah tantangan. Untuk menangani kawasan kumuh dari sisi perumahan terkait banyak aspek. Khususnya, banyak rumah tak layak huni yang berdiri di atas tanah bukan hak milik. Di antaranya, berdiri di atas tanah wedi kengser.

- Bappeda
- Dit. PUPKP
- ✓ Netral ✓ Biasa
- ✓ Untuk diketahui

Rusunawa Menyasar

• Sambungan Hal 13

Sultan Ground (SG), atau yang status tanahnya tidak sah

Sehingga, dari tinjauan dan kajian beberapa aspek tersebut, maka solusi pembangunan rusunawa menjadi alternatif yang memungkinkan. Dia juga menyebut, penanganan kawasan kumuh berbeda halnya dengan rumah tidak layak huni yang status kepemilikannya jelas, maka dapat dibenahi melalui anggaran pemerintah.

"Rusunawa bisa menjadi solusi dari persoalan ini. Pembangunan rusunawa ini nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Pemkot hanya memberikan kajian teknisnya sesuai yang dibutuhkan," paparnya.

Studi kelayakan
Seusai mengerucutkan tiga lahan potensial untuk pembangunan rusunawa,

pihaknya akan mendetailkan peruntukkan lokasi ini dengan feasibility study atau studi kelayakan pada tahun ini.

Adapun dalam studi kelayakan ini, pihaknya akan memfokuskan pada beberapa aspek. Seperti daya tampung lahan, jumlah warga setempat yang dapat menggunakan, dan mengukur lahan di lokasi tersebut.

Menurut Edy, hasil studi kelayakan akan disampaikan ke pemerintah pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dia berharap, nantinya bisa disetujui dan berjalan sesuai harapan. Sehingga, bisa dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia mengungkapkan, kegiatan penataan sungai selama beberapa tahun ini sebenarnya juga sudah digulirkan. Terutama melalui beberapa program penataan lingkungan yang dibia-

yai oleh pemerintah pusat. Seperti program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) maupun program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Dana Keistimewaan pun, kata dia, kelak dapat dimanfaatkan untuk menata sungai, maka tinggal dilakukan sinergi. Apalagi, selama ini kegiatan penataan sungai turut melibatkan peran masyarakat setempat.

Kotaku
Pemkot setempat menyatakan sedikitnya 10 Kelurahan di Kota Yogyakarta menjadi prioritas lokasi untuk penanganan kumuh, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2017. Program yang akan dianggarkan Rp8 hingga Rp9 miliar ini nantinya digadag-gadang akan menjadikan wajah Kota Yogyakarta yang bebas dari permukiman kumuh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menje-

laskan, 10 Kelurahan yang akan menjadi prioritas lokasi Kotaku ini adalah Kelurahan Bumijo, Kricak, Tegalarjo, Prawirodirjan, Ngupasan, Sorosutan, Purbayan, Brontokusuman, Bactro, dan Klitren.

"Di wilayah tersebut, rata-rata yang akan kami tata adalah kawasan bantaran sungai. Ada tiga sungai yang melalui kawasan tersebut, yakni Code, dan Gajahwong," kata Agus.

Dia menyebutkan, program Kotaku adalah bisa mencapai target pengurangan kawasan kumuh hingga 80 hektar per tahunnya. Di Kota Yogyakarta, pihaknya memetakan ada 45 Kelurahan dengan luasan 264,90 hektare yang masuk ke kawasan kumuh.

"Kami targetkan bisa berkurang 80 hektare per tahunnya dan bisa mendukung program pemerintah pusat untuk menciptakan nol persen kawasan kumuh," katanya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005